

STUDI POTENSI PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI SULAWESI SELATAN



STUDI POTENSI PENGEMBANGAN SENTRA UKM DI SULAWESI SELATAN

Diterbitkan oleh:



**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan**

STUDI POTENSI PENGEMBANGAN SENTRA UKM DI SULAWESI SELATAN

Tim Peneliti

Ketua: Multief Salman

Anggota: Netty S. Said, Hidrawati A. Ala,
Nurliani Karman, Asdar Djamereng, Nur Anli, Harun M. Nur

Diterbitkan Oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan**

Cetakan Pertama, Desember 2006
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau menyebarkan
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 979-1007-03-9

KATA PENGANTAR

Salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam tahun 2006 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Universitas Muslim Indonesia adalah kegiatan yang mendukung Agenda Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah yaitu Program Pemantapan Ekonomi Kerakyatan di Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan program pokok yang diterapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang salah satu tujuannya adalah memfasilitasi pengembangan gerakan ekonomi yang berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan agar dapat mandiri dan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut maka telah dilakukan penelitian tentang "Studi Potensi Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sulawesi Selatan", yang bertujuan untuk: (1) mengungkap kondisi perkembangan sentra Usaha Kecil dan Menengah; (2) memberikan gambaran potensi pengembangan sentra Usaha Kecil Menengah; dan (3) merancang pemetaan sebaran potensi sentra Usaha Kecil Menengah berdasarkan jenis usahanya di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: (1) memberikan gambaran potensi pengembangan sentra Usaha Kecil Menengah di Sulawesi Selatan; (2) memberikan informasi kepada investor untuk berpartisipasi dalam penanaman modal, dan (3) menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan sentra Usaha Kecil Menengah di Sulawesi Selatan.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan penelitian pada masa datang. Semoga apa yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan ketahanan ekonomi wilayah khususnya dalam merealisasikan program pemantapan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2006

Kepala Balitbangda Prop. Sulsel,



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji kondisi pengelolaan sentra usaha kecil dan menengah (UKM), (2) memberikan gambaran potensi pengembangan sentra UKM, dan (3) merancang pemetaan sebaran potensi sentra UKM berdasarkan jenis usahanya di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan survei pada sentra usaha kecil di Sulawesi Selatan. Populasi adalah sentra UKM yang terdapat di daerah penelitian, yaitu sentra UKM di Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Penentuan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan aspek homogenitas dan kondisi riil unit usaha. Jumlah sampel sentra UKM di Kabupaten Gowa sebanyak 3 sentra dengan 22 unit usaha, Kota Makassar sebanyak 6 sentra dengan 27 unit usaha, dan Kabupaten Bone sebanyak 4 sentra dengan 27 unit usaha. Total jumlah sentra adalah 13 sentra dengan 76 unit usaha. Data diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta metode “kelayakan” menggunakan sejumlah indikator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kondisi pengelolaan sentra UKM di Sulawesi Selatan saat ini dari aspek administrasi masih sangat lemah, pemasaran dominan pada tingkat lokal, bahan baku sebagian besar diperoleh dari daerah setempat, modal usaha umumnya antara Rp. 10 – 20 juta/bulan, permintaan menunjukkan tren yang meningkat per tahun, lokasi usaha strategis dan mudah dijangkau, teknologi yang digunakan umumnya masih tradisional, dan kurang mendapat dukungan dari pemerintah, 2) potensi pengembangan sentra UKM di Sulawesi Selatan terbagi atas potensi **tinggi**, **sedang**, dan **rendah**, dan 3) pemetaan potensi pengembangan sentra UKM di Sulawesi Selatan yang masuk kategori potensi-tinggi adalah sentra UKM songkok bone, sentra UKM bosara, dan sentra UKM perajin besi di Kabupaten Bone. Kategori potensi-sedang adalah sentra UKM meubel dan sarung tenun sutera di Kabupaten Gowa, dan sentra UKM meubel, tukang jahit jok, kompor dan perajin emas di Kota Makassar. Sedangkan sentra UKM

batu merah di Kabupaten Gowa, perajin jok kursi dan perak di Kota Makassar, serta perajin kuningan di Kabupaten Bone termasuk kategori potensi-rendah.

Berdasarkan temuan di atas, maka direkomendasikan bahwa pengembangan sentra UKM songkok Bone, bosara, hasil kerajinan perajin besi di Kabupaten Bone harus diprioritaskan. Kemudian sentra UMK meubel dan sarung tenun sutera di Kabupaten Gowa, dan sentra UKM meubel, tukang jahit jok kursi, perajin kompor dan emas di Kota Makassar perlu pembinaan dan pembibingan secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This research aim to: 1) studying the management condition of Small and Medium Enterprise (SME) center, 2) illustration potency SME center development, and 3) determining potency category of SME center base on type of enterprise in Sulawesi South.

This Research is a survey at SME center in Sulawesi South. Population is SME center which there are in Gowa, Bone regency and Makassar city. Method determination of sampel by purposive base on consideration of homogeneity and real condition of business. Amount of SME center sampel in Gowa regency are 3 centers consist of 22 business unit, Bone regency are 4 centers consist of 27 business unit and at Makassar city are 6 centers consist of 27 business unit. Total amount of SME center consist of 76 business unit. Data obtained through interview. Data analysed by qualitative, quantitative descriptively, and eligibility method using sum of indicators.

Result of research indicate that: 1) management condition of SME center in Sulawesi South this time, look through administration aspect still very low performance, dominant marketing still at local market, raw material most obtained from local area, capital employed generally between Rp. 10 - 20 million / months, demand indicate increasing every year, location of business is easy to reached and strategic, used technology generally still is traditional, and get less support from government, 2) potency development of SME center in Sulawesi South can divided be high, average and lower category, and 3) potency of SME center development in Sulawesi South is high potency category at SME center of Bone's Songkok, bosara and handicraft made of iron in Bone regency. Average potency category at SME center meubel and weave-silk-sarong in Gowa regency. As well as SME center of meubel, sartorial of saddle/jok of chair, stove and goldsmith in Makassar city. While SME center of sartorial of saddle/jok of chair, silverwoker are low potency category.

From the result above, it can be recommended to development of SME center of bone's songkok, bosara, and iron handicraft in Bone regency have to be given high priority. And then meubel SME center and weave-silk-sarong in Gowa regency, as well as meubel, sartorial of saddle/jok of chair, worker of stove and goldsmith in Makassar city need tuition and assistance continually.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoretis	9
B. Kerangka Pikir	22
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Indikator /Parameter	30
D. Pendekatan dan Model Analisis	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengelolaan Sentra UKM	33
B. Potensi Pengembangan Sentra UKM	50
C. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Pengembangan	87

BAB V.	KESIMPULAN, SARAN, REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92
C.	Rekomendasi Kebijakan	92
D.	Implikasi Kebijakan	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah UMKM yang Dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM di Sulawesi Selatan, Periode Tahun 2000 – 2005	3
Tabel 2.	Gambaran Sentra UKM di Daerah Penelitian	33
Tabel 3.	Aspek Administrasi Sentra UKM di Daerah Penelitian	35
Tabel 4.	Aspek Pemasaran Sentra UKM di Daerah Penelitian	36
Tabel 5.	Nilai Penjualan Sentra UKM di Daerah Penelitian	39
Tabel 6.	Biaya Produksi Sentra UKM di Daerah Penelitian	40
Tabel 7.	Modal Sentra UKM di Daerah Penelitian	41
Tabel 8.	Gambaran Sarana Jalan dan Aksesibilitas Sentra UKM di Daerah Penelitian	42
Tabel 9.	Gambaran Aspek Lingkungan Usaha Sentra UKM di Daerah Penelitian	43
Tabel 10.	Sumber Bahan Baku Sentra UKM di Daerah Penelitian	44
Tabel 11.	Gambaran Keaktifan Mengikuti Pelatihan Sentra UKM di Daerah Penelitian	46
Tabel 12.	Gambaran Permintaan Sentra UKM di Daerah Penelitian	47
Tabel 13.	Gambaran Dukungan Pemerintah dan Kondisi Persaingan Usaha Sentra UKM di Daerah Penelitian	49
Tabel 14.	Potensi Pengembangan Usaha Meubel Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Gowa, 2006	52
Tabel 15.	Potensi Pengembangan Usaha Batu Merah Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Gowa, 2006	55

Tabel 16.	Potensi Pengembangan Usaha Sarung Sutra Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Gowa, 2006	59
Tabel 17.	Potensi Pengembangan Usaha Perajin Jok Kursi Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	61
Tabel 18.	Potensi Pengembangan Usaha Meubel Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	63
Tabel 19.	Potensi Pengembangan Usaha Tukang Jahit Jok Kursi Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	66
Tabel 20.	Potensi Pengembangan Usaha Kemplor Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	69
Tabel 21.	Potensi Pengembangan Usaha Kerajinan Perak Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	72
Tabel 22.	Potensi Pengembangan Usaha Kerajinan Emas Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kota Makassar, 2006	74
Tabel 23.	Potensi Pengembangan Usaha Songkok Bone Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Bone, 2006	76
Tabel 24	Potensi Pengembangan Usaha Bosara dan Bodo-bodo Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Bone, 2006	79
Tabel 25	Potensi Pengembangan Usaha Perajin Besi Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Bone, 2006	82
Tabel 26	Potensi Pengembangan Usaha Kerajinan Kuningan Berdasarkan Potensi Pasar, Tenaga Kerja dan Finansial di Kabupaten Bone, 2006	85
Tabel 27	Rekapitulasi Potensi Pengembangan Sentra UKM Berdasarkan Jenis Usaha, Tahun 2006	88

Tabel 28	Pemetaan Potensi Pengembangan Sentra UKM Berdasarkan Jenis Usaha, Tahun 2006	89
Tabel 29	Pemetaan Urutan Potensi Pengembangan Sentra UKM Berdasarkan Jenis Usaha, Tahun 2006	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Pengembangan Sentra UKM di Sulawesi Selatan	23
Gambar 2.	Perajin Meubel di Kabupaten Gowa	53
Gambar 3.	Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan bahan baku pada usaha baru marah	56
Gambar 4.	Pencetakan batu merah dilakukan secara manual	57
Gambar 5.	Pemintalan sarung sutera yang menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Pertanyaan Studi Potensi Pengembangan Sentra Ukm Di Sulawesi Selatan	99
-------------	--	----

BAB	PENDAHULUAN
I	

A. Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan potensi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, karena selain memiliki jumlah unit yang besar, juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 40 197 611 unit. Sekitar 40 137 773 unit (99.8%) adalah usaha kecil, 57 743 unit (0.14%) adalah usaha menengah, dan 2 095 (0.01%) adalah usaha besar (BPS, 2004). Kontribusi UKM di atas, mampu menyediakan 99.04 % lapangan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UKM mempunyai sumbangan nyata dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan oleh kemampuan menggerakkan UKM.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari suatu negara memandang penting keberadaan UKM (Berry, 2001). Alasan **pertama**, UKM cenderung menghasilkan tenaga kerja yang produktif. **Kedua**, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. **Ketiga**, UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Kuncoro (2000) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Namun demikian, seiring dengan keberadaan dan sumbangannya yang nyata dalam perekonomian nasional, UKM juga menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal yang cukup krusial. Secara spesifik permasalahan internal tersebut adalah: (1) terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, (2) rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM), (3) pengembangannya terhambat oleh konsentrasi rakyat di pedesaan yang

bergerak pada sektor pertanian, dan (4) kelembagaan usaha belum berkembang secara optimal dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat (Soetrisno, 2005).

Adapun permasalahan eksternal meliputi: (1) terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan UKM, (2) kesulitan mendapatkan data yang jelas dan pasti tentang jumlah dan penyebaran UKM, (3) alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang, baik antar golongan, antar wilayah, dan antar desa-kota, (4) sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek, (5) rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan, (6) terbatasnya akses pasar dan (7) terdapatnya pungutan-pungutan yang tidak proporsional.

Sejak krisis moneter, dan kemudian diikuti krisis ekonomi lebih luas, dampak tidak menyenangkan dialami pula di sektor UKM. Hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, antara lain: (1) tingginya suku bunga kredit, sehingga suplai kredit berkurang, berakibat pada kurang terbukanya sektor produksi, (2) tingginya biaya impor bahan baku dan suku cadang, yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, sehingga keperluan modal kerja meningkat, (3) tingginya biaya untuk permesinan, peralatan, dan suku cadang, yang berkaitan dengan teknologi, dan (4) *cash-flow* terganggu akibat lambatnya pembayaran utang.

Terlebih lagi, UKM yang dikelola secara individual teramat sangat sulit untuk berkembang. Kesulitan tersebut di antaranya dalam hal: (1) menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah produksi yang besar, (2) pemberlakuan standar yang homogen, (3) *delivery* yang tepat dan teratur, (4) kesulitan dalam mencapai skala ekonomis pembelian bahan input produksi, (5) akses informasi pasar, (6) jasa keuangan dan konsultasi dan (7) internalisasi faktor pendukung seperti pelatihan, penelitian pasar, logistik dan inovasi teknologi.

Di sisi lain, UKM menghadapi tantangan yang cukup berat dalam pengembangannya. Menurut Haeruman (2000), tantangan pengembangan UKM mencakup aspek yang luas, di antaranya: (1) peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, (2) kompetensi kewirausahaan, (3) akses yang lebih luas terhadap permodalan, (4) informasi pasar yang transparan,

(5) faktor input produksi lainnya, dan (6) iklim usaha yang sehat dan mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat.

Menurut data BPS Tahun 2004, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Selatan adalah sebanyak 1 594 602 unit usaha. Selanjutnya menurut data Kantor Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2005, jumlah UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah 7 902 unit yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun sebaran UMKM di Sulawesi Selatan pada tahun 2000 hingga 2005 berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah UMKM yang Dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM di Sulawesi Selatan, Periode Tahun 2000-2005

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Selayar	60	70	70	70	71	76
2	Tana Toraja	158	158	174	191	191	195
3	Enrekang	140	155	155	158	158	160
4	Pinrang	173	181	191	202	197	207
5	Luwu	386	440	253	256	261	264
6	Gowa	214	220	329	345	330	354
7	Takalar	134	134	187	209	207	218
8	Jeneponto	137	137	177	180	180	180
9	Bantaeng	101	101	120	134	134	140
10	Bulukumba	76	193	201	208	208	216
11	Sinjai	96	96	100	108	108	107
12	Bone	728	728	795	877	798	798
13	Wajo	197	233	287	243	307	308
14	Soppeng	125	129	141	145	146	152
15	Sidrap	154	154	190	243	244	250
16	Barru	86	87	95	96	95	178
17	Pangkep	130	156	160	174	174	227
18	Maros	176	210	212	221	219	298
19	Pare-Pare	152	152	158	160	160	160
20	Makassar	763	763	1.056	996	978	1 027
21	Luwu Utara	189	194	242	268	238	155
22	Kota Palopo	177	183	200	209	211	227
	Jumlah	6 552	6 875	7 495	7 696	7 619	7 902

Sumber: Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, 2006.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Sulawesi Selatan yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM mengalami peningkatan selama 6 tahun terakhir. Peningkatan UMKM selama kurun waktu 6 tahun mencapai 17.08%. Persentase tersebut memberikan kesan bahwa laju peningkatan UMKM tergolong cukup lamban. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya "*political will*" pemerintah, masih terbatasnya akses UMKM tersebut terhadap komponen permodalan, manajemen bisnis, teknologi, informasi pasar, dan sebagainya.

Terkait dengan masalah di atas, hal lain yang dapat dijadikan indikator kurang berkembangnya UKM di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap UKM yang memiliki bidang/jenis usaha yang merupakan "*trade mark*" UKM bersangkutan. Misalnya usaha pandai besi (sabit, parang, pacul, dan sebagainya) di Massepe Kabupaten Sidrap, tidak mampu menghasilkan produksi yang berkualitas (berdaya saing) karena metode produksi, teknologi (alat) yang digunakan, dan sarana yang dimiliki masih tradisional yang diperkirakan beroperasi sudah lebih dari 30 tahun lamanya. Permasalahan dengan kondisi yang sama dapat dijumpai di beberapa kabupaten lainnya, seperti usaha pertenunan ulat sutera di Soppeng, usaha agribisnis (pengalengan) nenas di Wajo, usaha jagung di Takalar, dan usaha peternakan sapi di Enrekang.

Permasalahan yang dihadapi UKM seperti yang dikemukakan di atas, aspek modal menempati posisi tertinggi. Hasil penelitian kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) dengan BPS (2003) menemukan bahwa 72.47% UKM mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha. Dari 72.47% tersebut, kesulitan utama terletak pada aspek permodalan (51.09%); pemasaran (34.72%); bahan baku (8.59%), sarana transportasi (4.15%), dan ketenagakerjaan (1.09%). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Gofur (2004) pada UKM yang berusaha di bidang garmen di Jakarta yang menemukan bahwa 82.30% pengrajin tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.

UKM pada umumnya juga menghadapi permasalahan dari aspek pemasaran produknya. Anonimous (2003) menemukan bahwa UKM dengan ciri skala usaha yang kecil menghadapi permasalahan terhadap pemasaran disebabkan karena beberapa faktor: yaitu banyaknya pesaing (53.77%), harga jual rendah (27.40%),

pasar jenuh (6.51%), informasi kurang (4.45%), dan lainnya (7.88%). Faktor lain yang berpengaruh terhadap pengembangan UKM adalah terjadinya kesulitan bahan baku. Kesulitan UKM memperoleh bahan baku merupakan dampak dari harga yang mahal (51.30%), kualitas rendah (9.74%), dan lainnya (7.14%). Atas dasar itu, agar UKM dapat berkembang dengan baik maka diperlukan bimbingan, pelatihan, atau layanan bisnis yang sejenis disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh setiap UKM.

Menurut Staley dan Morse (1965), terdapat karakteristik khusus dari suatu produk yang cocok untuk industri kecil dan kelompok produk yang cocok untuk industri besar. Industri kecil tidak akan mampu bertahan pada kelompok produk yang cocok untuk industri besar. Sebaliknya, industri besar tidak akan tertarik untuk masuk dan bersaing dalam kelompok produk yang cocok untuk industri kecil, karena pertimbangan efisiensi skala usaha. Peran pemerintah ini juga bukan semata-mata pada pemberian modal, tetapi lebih pada membina kemampuan industri kecil dan membuat suatu kondisi yang mendorong kemampuan industri kecil dalam mengakses modal (Pardede, 2000).

Oleh sebab itu, pengembangan UKM idealnya memang membutuhkan peran (campur-tangan) pemerintah dalam peningkatan kemampuan bersaing. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemampuan di sini bukan dalam arti kemampuan untuk bersaing dengan usaha (industri) besar, akan tetapi lebih pada kemampuan untuk memprediksi lingkungan usaha dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi lingkungan tersebut.

Walaupun posisi strategis UKM tidak terbantahkan, akan tetapi persoalan yang dihadapinya juga sangat kompleks, karena karakteristik UKM yang berskala kecil, padat karya, berbasis sumberdaya lokal dan dengan berbagai keterbatasannya. Untuk meningkatkan daya saingnya, perlu dipilih strategi pengembangan UKM yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai adalah dengan pengembangan UKM melalui pendekatan kelompok serta membangun jaringan usaha yang saling terkait. Pendekatan pengembangan aktivitas UKM secara berkelompok dikenal dengan istilah **sentra** (Taufiq, 2004).

Pengembangan UKM melalui pendekatan sentra dimaksudkan agar beberapa UKM melakukan kegiatan usaha yang sejenis. Pendekatan sentra diposisikan sebagai perangsang (*stimulus*) bagi UKM, dunia usaha dan daerah untuk mengembangkan atau mereplikasi sendiri spesialisasi usahanya. Penerapan sentra UKM berdasarkan keterdekatan geografis dan kegiatan usaha yang sejenis memberikan suatu landasan bagi penciptaan pertalian-pertalian bisnis yang kokoh di dalam suatu sentra UKM, sehingga akan bermuara pada pengembangan rencana-rencana yang lebih maju. Melalui pendekatan sentra, dukungan kepada UKM akan lebih efisien dan efektif sehingga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan perekonomian regional dan nasional.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. bagaimana kondisi pengelolaan sentra UKM di Sulawesi Selatan ?
2. bagaimana gambaran potensi pengembangan sentra UKM di Sulawesi Selatan ?
3. bagaimana pola sebaran potensi sentra UKM berdasarkan jenis usahanya di Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan

Penelitian dilakukan untuk:

1. mengkaji kondisi pengelolaan sentra UKM di Sulawesi Selatan;
2. memberikan gambaran potensi pengembangan sentra UKM di Sulawesi Selatan;
3. merancang pemetaan sebaran potensi sentra UKM berdasarkan jenis usahanya di Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. informasi yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam memberi gambaran potensi pengembangan sentra UKM di Sulawesi Selatan;
2. informasi bagi investor untuk berpartisipasi dalam penanaman modal;
3. bahan masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan sentra UKM di Sulawesi Selatan.